

# Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik

I Nyoman Sudira

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: belinyomanbagus@yahoo.com

**Abstrak:** Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruh negara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yang dilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator. Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akan tetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkan kepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akan dipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerja organisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusi konflik dan menjaga perdamaian dunia.

**Kata Kunci:** Perserikatan Bangsa-bangsa, Pasukan Perdamaian, Resolusi Konflik.

**Abstract:** *United Nations (UN) is known as an organization to protect all of the states, to keep the world in peace and keep stability among state. United Nations have authority to help the states which involved in conflict if both or more states are reach to dangerous level, which means they can't cope the conflict by themselves. United Nations do several solutions to help the states that is sent the peacekeeping operation, act as negotiator or mediator. All of the solutions is the ways to conflict resolution. However, United Nations's function as an organization to keep the world in peace face several challenges. Besides, United Nation's role during World War and Cold War makes global society view UN is not capable enough to keep the world in peace. In this paper, the writer will examine United Nations acts to solve the conflict, especially peacekeeping operation and UN's role as mediator. In the next section, this paper will examine the changes of UN to fix organization performance. Last, this paper will examine the challenges and priority of United Nation to solve the conflict and keep the world in peace.*

**Keywords:** *United Nations, Peacekeeping Operations, Conflict Resolution.*

## Pendahuluan

Saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dihadapkan pada persoalan yang mengancam perdamaian internasional, maka jalan utama yang biasanya ditempuh adalah menyelesaikan segala persoalan

secara damai. Dalam menyelesaikan persoalan antar negara yang bersengketa, PBB sudah menjalankan peranannya sebagai mediator, sementara dalam kasus konflik bersenjata maka yang ditawarkan adalah gencatan senjata. Jalan lain yang bisa ditempuh dalam menangani konflik-

konflik yang terjadi yang ditenggarai mengancam perdamaian internasional adalah dengan penerapan sanksi.<sup>11</sup> Sanksi yang diberikan disini bisa berbentuk verbal sederhana seperti kecaman dan bisa dalam bentuk intervensi militer. Adapun beberapa bentuk sanksi yang pernah diberikan adalah embargo militer, ekonomi, pelarangan terbang dan pelayaran, dan isolasi diplomatik.<sup>12</sup>

Ada peperangan yang diselesaikan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) seperti misalnya Perang Iran-Irak (1988), kemudian persoalan Namibia diselesaikan dengan penandatanganan persetujuan melalui forum yang disediakan oleh Sekretariat Jendral. Dalam situasi yang lain PBB juga terlibat dalam negosiasi dengan perwakilan khusus, seperti misalnya pada perundingan perdamaian mengenai masalah Siprus, El Salvador, Mosambik, Liberia, Republik Afrika Tengah, Tajikistan dan Sahara Barat.<sup>13</sup> Kemudian memasuki tahun 2010 hingga 2012, dimana kawasan Timur Tengah dilanda gejolak yang diawali di Tunisia, kemudian

menyebar ke Mesir, diikuti oleh Libya dan hingga saat ini di Suriah, PBB juga melakukan beragam upaya perdamaian serta pencarian resolusi terbaik yang bisa diterima bagi pihak yang bersengketa.

Ilustrasi diatas mengindikasikan bahwa PBB sudah menempuh banyak jalan untuk penciptaan Perdamaian dunia. Peranan yang dilakukan PBB sudah terbukti beragam: PBB bisa berperan sebagai kerangka kerja untuk menentukan aksi perdamaian, bisa bertindak sebagai aktor yang independen, menangani proses penyelesaian tapi tanpa kehilangan visi tentang apa yang diinginkan oleh negara anggota.<sup>14</sup>

### **Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Konflik**

PBB adalah organisasi utama yang didedikasikan untuk perdamaian dan keamanan. Ada banyak peranan PBB dalam proses perdamaian yang jejak rekamnya meningkat pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Berdasarkan data dari *Upsala Conflict data project*, catatan sejarah persetujuan perdamaian yang pernah ditandatangani di dunia ini : 5

<sup>11</sup> Peter Wallensteen (ed), 1997, *International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?*. Upsala University, Department of Peace and Conflict Research. Hal. 122-123.

<sup>12</sup> Lihat misalnya, David P. Barash dan Charles P. Webel. 2002. *Peace and Conflict Studies*. London, Sage Publications. Hal. 353.

<sup>13</sup> Peter Wallensteen, 2002, *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. Sage publications Hal. 232.

<sup>14</sup> Lihat Thomas G. Weiss, David Forsythe, dan Roger A. Coate, 2001. *The United Nations and Changing World Politics*. (3<sup>rd</sup> edn). Boulder Co, Westview Press.

perjanjian damai antar negara, 17 persetujuan perdamaian perang saudara, dan 15 perjanjian perdamaian konflik formasi negara.<sup>15</sup> Bila diasumsikan bahwa perjanjian tersebut adalah tahap awal dari proses resolusi konflik maka dari seluruh perjanjian tersebut 25 adalah atas inisiatif PBB melalui keterlibatan Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretariat Jenderal.<sup>16</sup> Kemudian tahun 2012 hanya untuk kawasan Timur Tengah saja PBB sudah melahirkan 5 perjanjian yang berkenaan dengan penggalangan perdamaian diantaranya: *Understanding regarding ceasefire in the Gaza Strip*, *Final Communique of the Action Group for Syria*, *Resolution 2043 (2012): The Situation in the Middle East*, *Preliminary Understanding on the United Nations Supervision mechanism in the Syrian Arab Republic*, dan *Six Points Proposal of the Joint Special Envoy of the United Nations and the League of the Arab States*.<sup>17</sup> Hal ini membuktikan bahwa perhatian dan kontribusi PBB terhadap resolusi konflik

atau penggalangan perdamaian adalah sangat besar.

PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga: *Pertama, Menciptakan Perdamaian (Peacemaking)*; bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.<sup>18</sup> *Kedua, Menjaga Perdamaian (Peacekeeping)*: Intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakan kesepakatan, bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinnya kesepakatan dan dilaksanakannya

<sup>15</sup> Peter Wallensteen, 2002, *Op.Cit.* hal. 80.

<sup>16</sup> Lihat Misalnya, Bjorn Scogmo, 1989, *UNIFIL: International Peacekeeping in Lebanon, 1978-1988*, Boulder Colorado Lynne Rienner. Bandingkan juga dengan: Samuel Makinda, 1993, *Seeking Peace from Chaos: Humanitarian Intervention in Somalia*. Boulder Co. Lynne Rienner.

<sup>17</sup> United Nation, DPA (2014) *Peace Agreement Database, United Nation Peacemaker*.

<sup>18</sup> Lihat misalnya, International Peace Academy, 1984. *The Peacekeepers Hand Book*. New York Pergamon.

<sup>19</sup> Ronald J Fisher 1997, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press. Hal.11.

kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati.<sup>19</sup>

*Ketiga, Menggalang Perdamaian (Peacebuilding):* adalah usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang.<sup>20</sup> Jika mengacu pada pandangan Johan Galtung, *Peacebuilding* bisa dipahami dalam dua pandangan. Pertama, mengacu pada perubahan sosial dan pembangunan ekonomi yang nantinya akan mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, merupakan segala usaha untuk meningkatkan hubungan antar pihak yang bersengketa menuju pada peningkatan kepercayaan dan kerjasama, persepsi yang benar, menciptakan sikap yang positif, dan keinginan politik yang kuat untuk secara

konstruktif menghilangkan perbedaan diantara mereka.<sup>21</sup>

PBB dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian tidaklah semua nya berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak korban sipil di wilayah konflik pada saat operasi perdamaian yang dilakukan PBB seperti di Bosnia Herzegovina telah mengundang banyak kritik tentang kapabilitas perlindungan kemanusiaan.<sup>22</sup> Akan tetapi, dibalik kerasnya kritik tersebut, pandangan yang meyakini bahwa hanya PBB badan yang mampu mengkombinasikan politik, militer, dan *humanitarian intervention* dalam rangka mengurangi dan mengurai misteri konflik harus diakui.<sup>23</sup>

Operasi perdamaian yang diemban oleh PBB adalah bagian penting dari sebuah tugas besar yang dinamakan Resolusi Konflik. Ini mengindikasikan bahwa ada kesamaan suara antara misi perdamaian disatu pihak dengan proses akhir menuju perdamaian yang

<sup>20</sup> Simon Fisher at.all. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council.Hal. 14.

<sup>21</sup> Johan Galtung, 1976. Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding. Dalam Johan Galtung: *Peace War and Defense: Essays in Peace Research II*, Copenhagen, Christian Ejlers. Hal. 282.

<sup>22</sup> Perhatikan misalnya, Richard K. Betts, 1994. *The Delusion of Impartial Intevention*. Foreign Affairs, 73, 6.hal 20-33. David Rieff, 1994, *The Illusions of Peacekeeping*, World Policy Journal, 11,3,hal. 1-18.

<sup>23</sup> Lihat John Harriss (ed). 1995, *The Politics of Humanitarian Intervention*, London and New York, Pinter books.

<sup>24</sup> Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 2001, *Hawkes and Doves: Peace Keeping and Conflic Resolutions*.Berghof Research Center for Costructive Conflict Management.Hal. 20.

sebenarnya (*durable peace*) yaitu pengaplikasian resolusi konflik.<sup>24</sup>

Dalam kaitan antara misi perdamaian dengan resolusi konflik, PBB memang tidak banyak terlibat selama Perang Dingin. Banyak konflik-konflik yang penting tidak dibawa ke PBB, seperti misalnya persoalan yang dialami oleh negara atau wilayah yang menjadi terbelah karena Perang Dingin (Jerman, Austria, Berlin, Cina, Vietnam dan Korea). Begitu juga konflik internal dari masing-masing blok yang tidak dibawa ke PBB seperti misalnya invasi Uni-Soviet ke Hungaria dan Czechoslovakia. Dengan demikian, kedua *major power* ini menempatkan bahwa manajemen konflik pada waktu itu berada di bawah kendali hubungan antar mereka. Meskipun mereka bisa terlibat dalam wilayah konflik pasti sebelumnya sudah melalui persetujuan terselubung antar mereka. Lebih parah lagi karena pada waktu Perang Dingin hubungan antar dua blok diwarnai dengan persaingan persenjataan, isu nuklir, dan ideologi antar mereka maka konflik-konflik yang terjadi selama Perang Dingin tidak tertangani dengan baik.<sup>25</sup>

Minimnya aktifitas PBB dalam menangani konflik pada era Perang Dingin juga bisa dilihat dari terbatasnya

resolusi yang dikeluarkan sejak organisasi ini berdiri (Januari 1946).

Pada tahun awal didirikannya memang ada aktifitas *peacekeeping* yang dijalankan, akan tetapi selanjutnya terutama pada saat Perang Dingin ada nuansa pembekuan dalam aktifitas misi perdamaian. Hak Veto yang dimiliki dua negara besar selama Perang Dingin memang menghambat mekanisme bekerjanya DK dalam melibatkan diri di wilayah konflik meskipun untuk tujuan keamanan. Bahkan di tahun 1950-an di masa puncaknya Perang Dingin jumlah veto yang dilakukan oleh negara adi kuasa hampir sama jumlahnya dengan resolusi yang dikeluarkan sebagai landasan keterlibatan DK dalam wilayah konflik. Tertundanya reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur misalnya bisa dijadikan bukti yang kuat betapa hak veto yang dimiliki Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (sekarang Rusia) memberi andil yang sangat besar dimana persoalan terpecahnya Jerman waktu itu menjadi sangat tidak menguntungkan jika dibawa kedalam mekanisme PBB. Hampir selama masa perang dingin DK hanya melibatkan diri dalam wilayah konflik hanya sampai pada penggelontoran

<sup>25</sup> Peter Wallensteen, 2002, *Ibid.* hal 241.

<sup>26</sup> Peter Wallensteen, 2002, *Op.Cit.* Hal. 239.

resolusi yang sifatnya sebatas rekomendasi dan himbauan.<sup>26</sup>

Kenyataan menjadi berubah sejak runtuhnya Uni Soviet (sekarang Rusia) yang sekaligus mengakhiri era Perang Dingin. Sejak akhir tahun 1980-an hingga 1994, jumlah operasi perdamaian yang dilaksanakan di seluruh dunia meningkat dramatis. Pada tahun 1991, dimana Perang Dingin berakhir, hanya ada lima operasi yang aktif di lapangan; tiga di Timur Tengah, operasi kecil di Kashmir, dan Pasukan penjaga perdamaian PBB di Siprus (UNFICYP). Antara tahun 1988 dan 1996, ada 29 operasi yang dilakukan. Jika dibandingkan dengan 13 operasi yang dilakukan antara tahun 1948 dan 1987 dan tidak ada satupun dalam tahun 1979 dan 1988, maka tidaklah berlebihan untuk mengatakan adanya perkembangan yang signifikan dalam peningkatan peran perdamaian PBB.<sup>27</sup>

Perkembangan terakhir terutama selepas perang dingin, juga menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan berkenaan dengan besaran, fungsi-fungsi, dan strategi dari misi perdamaian yang dijalankan PBB. Mekanisme bekerjanya DK pada era Perang Dingin selalu menekankan pada sikap dan prinsip-prinsip imparial, tidak menggunakan

kekerasan (kekuatan militer), hanya memberikan perhatian pada pihak yang bersengketa agar mulai menuju dan mematuhi perjanjian perdamaian yang pernah disepakati. Akan tetapi, dalam era sekarang DK tidak bisa lagi bertahan dengan mempertahankan mekanisme yang lama dalam keterlibatannya di daerah konflik. Apa yang dulu pernah dilakukan DK dalam mengelola konflik memang memiliki kelemahan dan sudah menjadi sasaran kritik. DK banyak dituduh hampir tidak melakukan apa-apa di Bosnia, akan tetapi melakukan banyak hal di Somalia, bahkan DK dianggap terlalu *over acting* dalam menangani Perang Irak-Kuwait yang menjelma menjadi perang Irak-AS. Saat ini, semua kesalahan dan kritik yang konstruktif tersebut sudah dijadikan bahan evaluasi untuk langkah ke depan. Singkatnya, PBB selepas Perang dingin tidak lagi mengenal model yang mengarahkan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan. Model yang dulu sudah tidak digunakan lagi.<sup>28</sup>

Sebagai respon terhadap kritik tersebut maka ada beberapa pemikiran baru yang nantinya membawa penyempurnaan bagi eksistensi peran DK dalam misinya menciptakan perdamaian baik dalam tingkat nasional maupun

<sup>27</sup> Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 2001, *Op.Cit.* Hal.3.

<sup>28</sup> Werner Bauwens dan Luc Reyckler, 1994. *The Art of Conflict Prevention*, New York, Brassey's. hal. 28.



internasional. Beberapa kelemahan terdahulu sudah dievaluasi dan kini DK menuju pada doktrin baru yang akan mengkombinasi pendekatan yang lebih sehat dan kuat dengan peningkatan misi perdamaian itu sendiri.<sup>29</sup> Biasanya sebuah misi perdamaian mengerahkan pasukan bersenjata kurang dari 10.000 personil, akan tetapi untuk kasus Kamboja, dan juga misi ke Bosnia, pasukan yang terlibat jumlahnya 30.000 dan 60.000 personil. Lebih penting lagi, misi dari penjaga perdamaian sudah bergeser dari yang dulunya hanya memonitor penempatan pasukan dan gencatan senjata, akan tetapi kini sudah sampai pada pengawasan Pemilu, *nation building*, serta fungsi-fungsi lainnya termasuk taktik dan strategi menekan yang tidak lagi hanya mengandalkan *collective enforcement actions*.<sup>30</sup>

Dua belas kategori operasi penjaga perdamaian yang diajukan oleh Diehl, Druman, dan Wall, menunjukkan betapa kompleksnya tugas yang harus disandang dalam misi perdamaian:

- a. *Traditional Peacekeeping*: melibatkan intervensi dari pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan

pihak yang berperang dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Dengan demikian ini membutuhkan penempatan netral sekelompok pasukan dengan izin negara tuan rumah sebagai kekuatan yang nantinya akan memfasilitasi proses gencatan senjata, memisahkan pihak yang bertikai dan menjamin rasa keamanan yang akan menjadi syarat utama bagi digelontorkannya proses resolusi konflik. Pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di Siprus pada awal 1964 dan di Lebanon Selatan sejak 1978 adalah contoh dari misi tradisional ini.<sup>31</sup>

- b. *Observations*: termasuk disini adalah penyebaran sejumlah pasukan (tanpa senjata) atas sepengetahuan negara tuan rumah untuk mengumpulkan informasi dan memonitor keadaan di daerah operasi biasanya pada saat gencatan senjata, yang biasanya diikuti dengan penandatanganan perjanjian. Apa yang dilakukan *United Nations Observer Mission in the Middle East (UNSTO)* pertama

<sup>29</sup> Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, *Ibid.* Hal. 2.

<sup>30</sup> Paul F. Diehl, Daniel Drucman and James Wall, 1998, *International Peace Keeping and Conflict Resolutions: A Taxonomic Analysis with Implications*. Journal of Conflict Resolution, 42 (1)(1998).Hal 33.

<sup>31</sup> Lihat International Peace Academy, 1984. *The Peacekeeper's Handbook*, New York, Pergamon. Lihat Juga Ronald J Fisher 1997, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press. Hal. 11.

pada tahun 1948, adalah contoh untuk hal ini.

- c. *Collective Enforcement*: adalah operasi militer dalam jumlah yang besar yang dibentuk untuk mempertahankan korban dari agresi internasional dan memulihkan situasi keamanan dan perdamaian dengan menghancurkan pasukan pihak *aggressor*. Kasus Perang Teluk dua dimana Kuwait di invasi oleh Irak yang akhirnya harus berhadapan dengan *Multinational Corporations* adalah contoh nyata disini. PBB mengeluarkan resolusi untuk mengusir Irak dari Kuwait dan pelaksanaannya dipimpin oleh Amerika Serikat.
- d. *Election Supervision*: termasuk disini adalah pengawasan dan *monitoring* berlangsungnya gencatan senjata, perlucutan persenjataan, dan pemilu yang demokratis sebagai kelanjutan dari persetujuan perdamaian antara kelompok yang sebelumnya berperang. Disini fungsi bisa berkembang menjadi pembantu perangkat keamanan lokal. Seperti misalnya misi PBB di Namibia pada akhir tahun 1980 dan di Kamboja pada awal 1990.
- e. *Humanitarian assistance during*

*conflict*: termasuk disini adalah pengangkutan dan pembagian pangan dan obat-obatan untuk kebutuhan hidup biasanya dilakukan berkoordinasi dengan NGO lokal dan internasional, untuk melayani penduduk selama konflik atau perang. Operasi PBB yang dilakukan di Somalia dan Bosnia di akhir tahun 1990 adalah contohnya.

- f. *State/nation building*: termasuk disini merestorasi hukum dan tatanan pada saat terjadi kekosongan pemerintahan, merekonstruksi infrastruktur dan aparat keamanan, memfasilitasi transformasi pemerintahan dari otoritas interim ke pemerintahan yang sebenarnya. PBB melakukan semua tugas ini di Kongo pada awal tahun 1960-an.
- g. *Pacification*: menumpas gangguan masyarakat, menghancurkan kelompok bersenjata lokal menekan kelompok yang berperang dan yang ingin memisahkan diri, serta menciptakan hukum dan tatanan dalam perang saudara, perang internasional, atau dalam kerusuhan nasional terutama yang membahayakan nyawa manusia, pelanggaran HAM dan perusakan fasilitas publik. PBB melakukan peran ini dalam peran



perdamaianya di Bosnia.

- h. *Preventive deployment*. Terdiri dari penempatan pasukan di antara pihak yang berperang untuk mencegah meluasnya pertempuran. Penempatan pasukan PBB di Macedonia yang dilakukan pada awal 1990 untuk mencegah meluasnya perang di kawasan Yugoslavia adalah contoh dari penggunaan non-tradisional dari kekuatan bersenjata.
- i. *Arm control verification*: termasuk inspeksi dari fasilitas militer, pengawasan penarikan mundur pasukan, dan aktifitas lainnya yang biasanya dilakukan oleh otoritas nasional dan bantuan teknis sebagai bagian dari kesepakatan kontrol persenjataan. Pasukan penjaga perdamaian multinasional melakukan tugas ini pada waktu operasi gurun Sinai yang diikuti dengan perjanjian damai Mesir dan Israel 1979. Ini adalah sebuah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam konstelasi politik di Timur tengah yang dikenal dengan perjanjian *Camp David*.
- j. *Protective service*: yang dimaksud disini adalah penciptaan tempat perlindungan yang damai, zona

bebas terbang, untuk melindungi kaum sipil dan biasanya tanpa pemberitahuan negara tuan rumah. Operasi perlindungan terhadap kaum Kurdi di Irak dan kelompok Muslim di Bosnia adalah contoh dari misi ini.

- k. *Intervention in support of democracy*: sebuah operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendukung pemerintahan dari pemilu yang bebas atau untuk melindungi pemerintahan demokratis yang ada dari ancaman. Operasi ini bisa melibatkan aksi militer terhadap kekuatan anti demokratis, dan memberikan bantuan dalam penegakan hukum, tatanan, dan selalu mendukung rezim yang demokratis. Invasi AS ke Panama tahun 1980 dan ke Haiti tahun 1994 bisa dijadikan ilustrasi dari misi ini.
- l. *Sanction enforcement*: adalah penggunaan kekuatan militer (darat laut dan udara) untuk menjaga persinggahan, menahan (barang/senjata) selundupan atau menghukum negara yang melanggar hukum (pelanggar HAM). Biasanya dilakukan oleh masyarakat internasional atau

pemerintahan nasional yang tidak terkena sanksi. Blokade terhadap Korea Utara, Iran, dan juga terhadap Kuba adalah contoh untuk hal ini.<sup>32</sup>

### Tantangan dan Prioritas Kedepan

Dua orang yang menjadi inisiator dari operasi *peacekeeping* secara terpisah dinobatkan sebagai peraih hadiah Nobel perdamaian: Lester Pierson pada tahun 1957, dan Anumerta Dag Hammarskjold pada tahun 1961. Penghargaan juga diberikan terhadap pasukan DK PBB yang sudah melaksanakan misinya di beberapa negara.<sup>33</sup> Akan tetapi, tugas misi perdamaian tidaklah berhenti sampai disini. Seiring dengan semakin kompleksnya isu dalam konflik-konflik yang terjadi maka tantangan baru pun akan muncul dan perlu diantisipasi untuk menentukan langkah misi perdamaian kedepan. Mengingat pentingnya peranan misi perdamaian saat ini, juga berkenaan dengan semakin kompleksnya isu di wilayah konflik maka misi perdamaian

dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di wilayah konflik.

Meskipun ada pengecualian seperti di Libanon dan di Kongo, kebanyakan dari misi penjaga perdamaian yang dibuat sebelum 1990 adalah melalui/sepengetahuan negara konflik dimana dukungan dan restu akan diberikan. Dalam waktu kedepan, mengingat adanya perkembangan dimana DK akan terlibat dimanapun terjadi persoalan yang dianggap mencancam keamanan internasional dan dalam situasi dimana restu dan ijin dari negara konflik bukan lagi sebagai suatu persyaratan, maka ada tuntutan baru yang harus dipersiapkan yaitu misi penjaga perdamaian harus selalu siap dengan segala situasi darurat politik juga dalam situasi perang nasional maupun lokal. Lebih penting lagi misi perdamaian harus siap bekerja dalam wilayah yang tanpa hukum dan sarat kekerasan.

Konflik-konflik yang terjadi terutama setelah Perang Dingin akan menjadi ujian bagi DK PBB terutama mengenai kapabilitasnya sebagai penjaga perdamaian. Kegagalan yang dialami di Rwanda, Somalia, dan Bosnia yang sudah banyak dikritik oleh para teoritis resolusi konflik, harus dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kapasitas operasi perdamaian dan menentukan langkah

<sup>32</sup> Pembahasan yang lengkap mengenai hal ini lihat misalnya, Paul F. Diehl, Daniel Drucman and James Wall, 1998, *International Peace Keeping and Conflict Resolutions: A Taxonomic Analysis with Implications*. 2006. Conflict Resolution Volume III, Sage Publications.

<sup>33</sup> 1.148 Personel Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XVIII-C yang telah menjalankan misinya di Lebanon Selatan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 1701, mendapat penganugerahan medali PBB. *Tabloid Diplomasi*, Edisi Oktober-2009.

baru kedepan. Menjadi penting bahwa dalam setiap misinya PBB harus selalu menekan jumlah korban sipil.

Di *Rwanda genocide* sudah mengambil 800.000 nyawa hanya selama bulan april dan juli 1994. Inilah yang sering disebut sebagai petaka besar diakhir abad 20. Kasus yang terjadi di Bosnia juga harus dijadikan pelajaran: kota muslim Bosnia, Srebrenica yang dijadikan tempat aman bagi kaum muslim dan di bawah resolusi Dewan keamanan PBB No 819 (16 April 1993) yang dikepung oleh milisi Serbia, ironisnya selama pengepungan 8.000 penduduk Muslim harus meregang nyawa di depan mata pasukan perdamaian Dewan Keamanan PBB.<sup>34</sup>

Kasus diatas serta apa yang sejak tahun 2012 sedang diinisiatifkan PBB di kawasan Timur Tengah terutama dalam penggalangan perdamaian *Arab Spring*, menunjukan bahwa kedepan nanti pasukan keamanan PBB akan selalu dihadapkan dengan isu-isu peningkatan korban jiwa, ancaman terorisme bagi seluruh umat manusia, maka prinsip netral, imparsial, dan hanya memerankan mediasi semakin harus ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Dengan demikian dua hal yang

sudah dimasukkan dalam laporan *assesment* DK yaitu proses refleksi untuk mengklarifikasi dan meningkatkan kapasitas PBB dalam merespon konflik-konflik yang terjadi dan menyadari kesalahan dari operasi *peacekeeping* dalam beberapa kurun waktu yang lalu dan berbenah diri untuk menghadapi tantangan kedepan harus segera diprioritaskan.<sup>35</sup>

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi dalam misi perdamaian PBB sejak berakhirnya Perang Dingin. Meskipun ada beberapa batu sandungan (kasus Rwanda dan Somalia) dalam keberhasilan misi perdamaian yang telah dilakukan PBB, tetap harus diyakini bahwa PBB adalah satu-satunya badan yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan menciptakan perdamaian bagi negara-negara di dunia ini. Akan tetapi jika PBB ingin mempraktekan *peacekeeping* yang efektif maka PBB tidak boleh memberi peluang kepada negara besar atau koalisi besar seperti NATO untuk mengendalikan langkah yang ingin ditempuh. Berikutnya PBB juga harus selalu meningkatkan kapabilitasnya untuk terlibat di setiap wilayah konflik. Ada beberapa hal yang

<sup>34</sup> Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham. Op.cit. Hal. 6.

<sup>35</sup> United Nations 1999, *Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations During the 1994 Genocide In Rwanda*. New York, United Nations. Hal. 81.

mendukung ke arah perbaikan ini seperti misalnya pembentukan *Rapidly Deployable Mission Headquarters* (RDMHQ) dan UN *Standby Arrangement System* (UNSAS) yang didirikan untuk meningkatkan kualitas dan rentang dari sumber *peacekeeping* yang disediakan oleh *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO). Terdapat juga ada *Standby High Readiness Brigade* (SHIRBRIG) yang di galang Denmark dengan jumlah pasukan 4.000-5000 personil yang mampu dikirim ke daerah konflik dalam tempo 13-15 hari.<sup>36</sup>

### Catatan Penutup

Mengacu pada dinamika peranan PBB dalam misi perdamaian yang sudah dibicarakan diatas, ada indikasi yang kuat bahwa sejak selepas Perang Dingin dan dimasa yang akan datang peran PBB sebagai penjaga keamanan akan semakin meningkat. Paling tidak ada empat alasan mengenai hal ini. *Pertama*, meningkatnya kapasitas yang dimiliki Dewan Keamanan dalam melakukan tindakan operasi perdamaian disertai dengan besarnya dukungan dan peningkatan

otoritas penggunaan pasukan militer termasuk pemberian sanksi secara langsung akan meningkatkan aktifitas peran PBB dalam operasi perdamaian.

*Kedua*, semakin meningkat dan menguatnya penegakan terhadap demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan isu-isu kemanusiaan akan memberikan legitimasi bagi negara-negara untuk memberikan perhatian pada kejadian-kejadian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam harkat hidup orang banyak. *Ketiga*, masih banyaknya konflik internal yang terjadi apakah karena krisis pemerintahan, perang saudara, akan membawa dampak pada semakin banyaknya pengungsi yang mengalir dari daerah konflik ke negara lain dan pada akhirnya akan mengundang perhatian dunia dan PBB untuk mengambil tindakan.<sup>37</sup> *Keempat* atau yang terakhir, peningkatan informasi yang meningkat pesat sudah membuat dunia menjadi sangat transparan dan hampir tidak ada permukaan dunia yang tidak terjangkau. Hal ini menjadi faktor penarik

<sup>36</sup> P. Langille, 2000. *Conflict Prevention: Option for Rapid Deployment and United Nations Standing Forces*. Dalam Oliver Rambotham dan Tom Woodhouse, 2000. *Peacekeeping and Conflict Resolution*. London Frank Cass. Hal. 219-253.

<sup>37</sup> Adam Robert, 1997, *New Criteria for Intervention in the Post-Cold War Period*. Dalam Peter Wallensteen (ed), 1997, *International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?*, Upsala University, Department of Peace and Conflict Research. Hal. 140.

## Daftar Pustaka

- Betts K. Richard, 1994. *The Delusion of Impartial Intervention*. Foreign Affairs, 73, 6.
- Barash P. David dan Charles P. Webel. 2002. *Peace and Conflict Studies*. London, Sage Publications.
- Diehl F. Paul, Daniel Druckman and James Wall, 1998, *International Peace Keeping and Conflict Resolutions: A Taxonomic Analysis with Implications*. Journal Of Conflict Resolution, 42 (1) (1998).
- Fisher Simon at.all. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council.
- Fisher J. Ronald, 1997, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press.
- Johan Galtung, 1976. *Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding*. Dalam, Galtung Johan: *Peace War and Defense: Essays in Peace Research II*, Copenhagen, Christian Ejlers.
- Harriss, John (ed). 1995, *The Politics of Humanitarian Intervention*, London and New York, Pinter books.
- Hansen, Wibke, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 2001, *Hawkes and Doves: Peace Keeping and Conflict Resolutions*. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- International Peace Academy, 1984. *The Peacekeeper's Handbook*, New York, Pergamon.
- Langille.P, 2000. *Conflict Prevention: Option for Rapid Deployment and United Nations Standing Forces*. Dalam Ramsbotham, Oliver dan Tom Woodhouse, 2000. *Peacekeeping and Conflict Resolution*. London Frank Cass.
- Makinda, Samuel, 1993, *Seeking Peace from Chaos: Humanitarian Intervention in Somalia*. Boulder Co. Lynne Rienner.
- Ramsbotham, Oliver dan Tom Woodhouse, 2000. *Peacekeeping and Conflict Resolution*. London Frank Cass.
- Robert, Adam, 1997, *New Criteria for Intervention in the Post-Cold War Period*. Dalam Wallensteen, Peter (ed), 1997, *International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?* Upsala University, Department of Peace and Conflict Research.
- Rieff, David, 1994, *The Illusions of Peacekeeping*, World Policy Journal, 11, 3, Bjorn Scogmo, 1989, *UNIFIL: International Peacekeeping in Lebanon, 1978-1988*, Boulder Colorado Lynne Rienner.
- Tabloid Diplomasi, Edisi Oktober- 2009.

United Nations 1999, *Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations During the 1994 Genocide In Rwanda*. New York, United Nations.

United Nation, DPA (2014) *Peace Agreement Database, United Nation Peacemaker*  
Wallenstein, Peter (ed), 1997, *International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?*, Upsala University, Department of Peace and Conflict Research.

Wallenstein, Peter. 2002, *Understanding Conflict Resoluton: War, Peace and the Global System*. Sage publications

Weiss G. Thomas, David Forsythe, dan Roger A. Coate, 2001. *The United Nations and Changing World Politics*. (3<sup>rd</sup> edn). Boulder Co, Wesview Press.

Werner Bauwens dan Luc Reychler, 1994. *The Art of Conflict Prevention*, New York, Brassey's.